

EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG

Juli Kristiarina Susanti¹, Sri Widayanti²

¹ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Jl. Soekarno Hatta, Sawitan II, Sawitan, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56511, Indonesia

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225, Indonesia

Email : julikusanti22@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.685>

Article Info

Article History;

Received:

2025-09-01

Revised:

2025-10-01

Accepted:

2025-10-28

Abstrak: Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diharapkan menjadikan proses pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dan salah satu sistem informasi yang dikembangkan dalam mendukung bidang kearsipan adalah aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang diterapkan secara nasional. Guna mendukung keberlanjutan pelaksanaan aplikasi ini dalam perspektif good governance maka perlu suatu evaluasi yang akan memberikan masukan dalam pengembangannya. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan melalui penggabungan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam operasi layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evaluasi penerapan aplikasi SRIKANDI selaku sistem informasi di bidang kearsipan yang merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam mendukung tata kelola pemerintahan dengan prinsip good governance dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun prinsip-prinsip good governance yang digunakan dalam mengevaluasi ini menggunakan lima prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, partisipasi serta aturan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai sumber yang terpercaya. Hasil temuan yang penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengevaluasi maka penerapan SRIKANDI dapat dinyatakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan arsip. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang diidentifikasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan bagi pegawai, serta resistensi terhadap perubahan sistem kerja manual ke digital. Kesimpulannya, evaluasi dilakukan berdasarkan indikator good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan hukum. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya peningkatan kapasitas SDM, pemutakhiran infrastruktur digital, dan penguatan regulasi internal agar penerapan SRIKANDI dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi, Penerapan, Aplikasi Kearsipan, Good Governance.

PENDAHULUAN

Berdasarkan konteks sosial masyarakat saat ini yang mengalami perubahan paradigma dalam memasuki era teknologi informasi berbasis internet serta dinamika perubahan informasi dan teknologi di berbagai bidang maka perubahan pun terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dari penggunaan media kertas (konvensional) dalam hal persuratan sebagai naskah dinas dituangkan dalam dokumen berbentuk kertas menjadi dalam media digital berbentuk aplikasi berbasis internet dengan

tetap memegang teguh kaedah pengelolaan kearsipan bahwa naskah dinas terjaga utuh, autentik dan bisa digunakan kembali serta mudah dalam pencarian.

Sehingga seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, bidang kearsipan mulai menggunakan teknologi untuk mendukung pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan presiden ini bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi umum bertujuan untuk menyajikan Layanan SPBE yang mendukung aktivitas pemerintahan terdapat dalam 8 bidang Percepatan Aplikasi Umum guna mendukung penerapan SPBE tersebut yang meliputi bidang pengaduan layanan publik, bidang penganggaran, bidang pengadaan barang dan jasa, bidang pemantauan dan evaluasi, bidang perencanaan, bidang akuntabilitas kinerja, bidang kearsipan dan bidang kepegawaian.

Aturan ini ditetapkan untuk mendorong serta mengawasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di semua tingkat pemerintahan. Dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diharapkan proses pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel. Tujuan implementasi sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam operasional layanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2019 menunjukkan bahwa hasil pemanfaatan teknologi dalam kearsipan belum dievaluasi dengan baik atau dalam kategori cukup karena pemanfaatannya tidak merata dan tidak terintegrasi antar instansi pemerintah. Untuk menjawab hasil evaluasi SPBE tahunan yang diterbitkan oleh MenPANRB yang diterbitkan dalam bentuk buku laporan SPBE dalam penyelenggaraan layanan publik, maka aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dibuat guna mendukung bidang kearsipan.

“Pemanfaatan teknologi dan informasi oleh pemerintahan perlu didukung perubahan mendasar dalam bentuk reformasi. Tanpa dukungan reformasi, tujuan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemerintah akan sulit tercapai”(Aristriya, 2024). Penerapan teknologi informasi Bidang Kearsipan dikuatkan dengan keputusan MenPANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan dalam diktum kesatu disebutkan dengan jelas bahwa keputusan ini menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Sedangkan hal penerapan dan implementasi aplikasi ini dinyatakan dalam diktum keempat bahwa menurut diktum pertama, pimpinan instansi pusat dan pemerintah daerah menerapkan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

Berdasarkan Keputusan MenPANRB nomor 679 tahun 2020 tersebut dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Mendagri tentang percepatan pelaksanaan SRIKANDI baik di tingkat pusat maupun daerah maka pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia diharapkan segera menerapkan dalam penyelenggaraan kearsipan di masing-masing instansi sejak diundangkannya keputusan menteri ini tahun 2020 yaitu diberlakukan mulai tahun 2021. Uji coba peluncuran Aplikasi SRIKANDI dilakukan di 3 (tiga) daerah sebagai piloting project tahun 2020 yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Deli Serdang. Tahap selanjutnya adalah penentuan target implementasi aplikasi SRIKANDI secara bertahap yaitu target tahun 2021 ada 30 provinsi/kabupaten/kota, target tahun 2022 ada 85 provinsi/kabupaten/kota, target tahun 2023 ada 85 provinsi/kabupaten/kota dan target tahun 2024 terdapat 80 provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Launching aplikasi Srikandi di Jawa Tengah dari 35 kabupaten/kota dilakukan pertama kali oleh Kabupaten Kendal pada tahun 2021. Launching ini dilakukan secara virtual. Sedangkan Kota Magelang sebagai kota terdekat dengan Kabupaten Magelang melakukan launching Aplikasi SRIKANDI pada Januari 2023. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Klaten meraih penghargaan

tingkat nasional atas pemanfaatan aplikasi Srikandi. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Permasalahan penerapan aplikasi Srikandi sebagai aplikasi kearsipan telah menjadi perhatian berbagai peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian oleh Alhadi & Rahmawati (2024) menunjukkan bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dibuat untuk menghadirkan kelancaran dalam persuratan dan kearsipan secara elektronik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan studi yang dilakukan oleh Rizal & Nurmantu (2025) menekankan pada mempercepat alur proses dan meningkatkan aksesibilitas dokumen secara real-time. Selain itu, Aini, (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa unit kerja yang telah menerapkan Srikandi, berpendapat bahwa dengan adanya aplikasi Srikandi memudahkan dalam proses persuratan dan penyelenggaraan kearsipan. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam hal penerapan dan penggunaan aplikasi Srikandi, namun masih terdapat celah dalam hal evaluasi terhadap implementasi setelah beberapa waktu diterapkan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam perspektif good governance. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memperdalam dan melengkapi kajian sebelumnya, khususnya dalam konteks evaluasi penerapan Aplikasi SRIKANDI dengan melihat perspektif prinsip-prinsip Good Governance di Kabupaten Magelang, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Manfaat penelitian ini memberikan saran dan masukan kepada instansi terkait perlunya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penerapan aplikasi SRIKANDI serta mendorong melakukan perbaikan dan pengembangan metode dan cara agar tepat sasaran sesuai dengan good governance.

KERANGKA TEORI ATAU KONSEP

Evaluasi;

Menurut Farida Yusuf Tayibnalis dalam buku *Evaluasi Program*, Ralph Tyler mengatakan bahwa evaluasi adalah proses yang menentukan seberapa jauh tujuan program dapat tercapai. Soedijanto (1996) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses yang terdiri dari kumpulan tindakan untuk mengukur dan menilai. Menurut Mardapi (2003, hlm. 12), optimalisasi sistem evaluasi berarti dua hal: sistem evaluasi yang memberikan informasi yang optimal dan manfaat yang dicapai dari evaluasi.

Menurut Alkin (1969, hlm. 19), evaluasi adalah proses mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi kepada para pemimpin dalam pengambilan keputusan dan Evaluasi, menurut Stufflebeam (1971, p. 19), Provus (1969, p. 19), dan Rivlin (1971, hal. 19), merupakan proses memperbandingkan informasi mengenai penampilan seseorang dengan norma yang telah disepakati secara umum. Marcolm dan Provus (1971, hal. 19) mengartikan evaluasi sebagai usaha untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dan suatu tolok ukur yang telah ditentukan, serta cara untuk menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Eisner (1976, p. 19) menyatakan bahwa evaluasi adalah penilaian suatu program secara kritis dengan memanfaatkan jasa keahlian

Penerapan;

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan pelaksanaan, Usman (2002) mendefinisikan pelaksanaan (implementasi) sebagai aktivitas, aksi, tindakan, atau terdapatnya mekanisme suatu sistem. Adapun Implementasi bukan sekadar aktivitas, namun juga suatu kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Setiawan (2004) mendefinisikan penerapan (implementasi) sebagai pengembangan aktivitas yang melibatkan proses interaksi yang menyesuaikan antara tindakan dan tujuan yang diambil untuk mencapainya. Untuk mencapainya, diperlukan juga pelaksana jaringan dan birokrasi yang efisien.

Menurut Wahab, penerapan merupakan tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. Dalam konteks ini, penerapan berarti menerapkan hasil kerja yang didapat dengan cara yang dapat diimplementasikan dalam Masyarakat.

“Implementasi aplikasi terkait pengelolaan kearsipan ini terlihat sangat bergerak cepat dan dinamis, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan arsip dan penyajian informasi di lingkungan Badan POM dengan sistem informasi berbasis teknologi sesuai kaidah kearsipan”(Kartiana et al., 2024).

“Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Aplikasi SRIKANDI telah berlangsung dengan efektif namun masih perlu beberapa perbaikan dalam pengembangan aplikasi SRIKANDI, lebih banyak pembinaan terhadap pengguna agar lebih mudah beradaptasi dan dapat lebih memahami penggunaan aplikasi SRIKANDI”(Rahmasari, 2024).

Aplikasi Kearsipan;

Tujuan pelaksanaan Kearsipan adalah untuk memastikan ketersediaan Arsip yang otentik dan dapat dipercaya, melindungi kepentingan negara serta hak-hak sipil masyarakat. Diperlukan Sistem Penyelenggaraan Kearsipan Nasional (SPKN) yang komprehensif dan terintegrasi, yang dapat mengenali eksistensi Arsip dengan hubungan informasi sebagai satu kesatuan data di semua organisasi dalam suatu Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).

Praktik pemanfaatan teknologi tersebut masih menyebabkan sejumlah masalah seperti manajemen Kearsipan secara elektronik yang terpisah, pengiriman surat secara elektronik melalui saluran yang tidak dapat diandalkan dan terpercaya, serta adanya penipuan dan akses ilegal terhadap Arsip yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan publik terhadap keabsahan Arsip yang dihasilkan dari aktivitas administrasi pemerintah.

Untuk meningkatkan akses serta kualitas layanan Kearsipan bagi masyarakat, AUBKD dapat diintegrasikan dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Penerapan AUBKD oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan Kearsipan yang terpadu.

“Salah satu keunggulan utama aplikasi SRIKANDI adalah kemampuannya untuk memfasilitasi kolaborasi antar-seksi atau departemen. Arsip yang tersimpan di SRIKANDI dapat diakses oleh pegawai yang berwenang di berbagai departemen, sehingga memudahkan proses kerja lintas unit dan meningkatkan efisiensi koordinasi”(Azzahra et al., 2025).

Good Governance

Good Governance Menurut Sedarmayanti (2012: 3), Governance semakin dikenal dengan istilah pemerintahan. Akan tetapi, arti dari pemerintahan itu bukan sekadar suatu aktivitas, melainkan mengandung makna pengelolaan, pengurusan, ada bimbingan, dan pengarahan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, praktik terbaiknya dikenal sebagai good governance atau pemerintahan yang baik. Dwipayana dan Eko yang dikutip dalam Syakrani (2009:122) juga menyatakan bahwa tata kelola merupakan suatu konsep yang netral, yang dapat membentuk model yang baik (sehat), sehingga muncul istilah good governance (governance yang baik). Oleh karena itu, governance dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam menerapkan pemerintahan yang efektif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Praktik pengelolaan dalam pelaksanaan pemerintahan yang paling efektif dapat disebut sebagai tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip good governance dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata prinsip berarti “dasar atau kebenaran yang menjadi fondasi dalam berpikir dan bertindak.” Maka, dengan berusaha menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, akan mendukung negara dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Ganie-

Rochman (2000) 167 INQUIRY INTO PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT. VOLUME 4 ISSUE 2 TAHUN 2020, Halaman 163-174 yang dirujuk dalam Syakrani (2009: 132) mengemukakan empat prinsip, yakni akuntabilitas, hukum, informasi, dan transparansi. Prinsip yang sama juga dikemukakan oleh Bhatta (1997) bahwa elemen utama dalam tata kelola adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum. Selanjutnya, UNDP (1997) yang dikutip dalam Mindarti (2016: 14) menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik mencakup Partisipasi (participation), Hukum (rule of law), Keterbukaan (transparency), Respons (responsiveness), Orientasi konsensus (consensus orientation), Keadilan (equity), Efisiensi dan efektivitas (efficiency and effectiveness), Tanggung jawab (accountability), serta Visi strategis (strategic vision). Dari semua prinsip good governance, studi ini akan mengaplikasikan tiga dari empat prinsip good governance yang diusulkan oleh Sedarmayanti (2012: 7), yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Menurut Sedarmayanti, keempat prinsip utama itu dapat menggambarkan administrasi publik yang mencerminkan pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder sejumlah 20 jurnal ilmiah dengan melacak sumber-sumber ilmiah tersebut melalui sejumlah aplikasi dan basis data daring seperti Google Scholar, Scopus, dan ResearchGate, serta repositori nasional seperti Garuda dan Sinta. Teknik pemilihan data dilakukan dengan kriteria inklusi dan eksklusi berdasarkan relevansi topik, tahun publikasi (5 tahun terakhir), kredibilitas sumber (jurnal terindeks), dan keterbaruan informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan dekriptif-analitis. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep yang relevan dengan fokus penelitian. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber literatur untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi, serta dengan melakukan penelaahan ulang oleh ahli (*expert review*) guna meminimalkan bias interpretatif.

HASIL DAN DISKUSI

Meskipun pemberlakuan dan penerapan SRIKANDI ini diterapkan sejak tahun 2021, namun Kabupaten Magelang baru menindaklanjuti amanat tersebut mulai tahun 2024 karena masih terdapat prasyarat penerapan Aplikasi SRIKANDI yang belum terpenuhi di Kabupaten Magelang yaitu harus adanya sertifikat Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) serta penguatan server yang belum memadai. Launching Aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Magelang dilaksanakan Desember 2023 berdasarkan SE Sekretaris Daerah no. 045.81/3754/17/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Aplikasi Kearsipan yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di wilayah Pemerintah Kabupaten Magelang yang berlaku mulai awal tahun 2024. Dalam Surat Edaran tersebut dengan jelas disampaikan semua Kepala Perangkat Daerah di bawah pemerintahan Kabupaten Magelang agar mempunyai komitmen untuk mendukung penerapan Aplikasi SRIKANDI dengan menyediakan sumber daya, baik infrastruktur maupun suprastruktur, penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan serta pendanaan yang memadai, melakukan pembinaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoptimalkan pelaksanaan urusan kearsipan dan diminta menerapkan aplikasi SRIKANDI ini mulai 2 Januari 2024.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang selanjutnya disebut Disdikbud Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 63 (enam puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang terdiri atas :

1. 24 Dinas/Badan,

2. 4 Rumah Sakit Daerah,
3. 21 Kecamatan,,
4. 5 Kelurahan dan
5. 9 Bagian Sekretariat Daerah,

Hal ini pun tidak luput untuk melaksanakan amanat Sekda terkait penerapan aplikasi SRIKANDI dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Terkait prasyarat implementasi SRIKANDI sudah bisa terpenuhi semua atau belum, dan jika belum yang mana yang belum terealisasi dan selanjutnya akan menjadi masukan dan pencarian solusi guna memenuhi prasyarat akan impelementasi SRIKANDI dengan selengkapnyanya. Prasyarat implementasi SRIKANDI setidaknya ada 5 poin yang harus disiapkan dan dipenuhi untuk menunjang implementasi SRIKANDI di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yaitu :

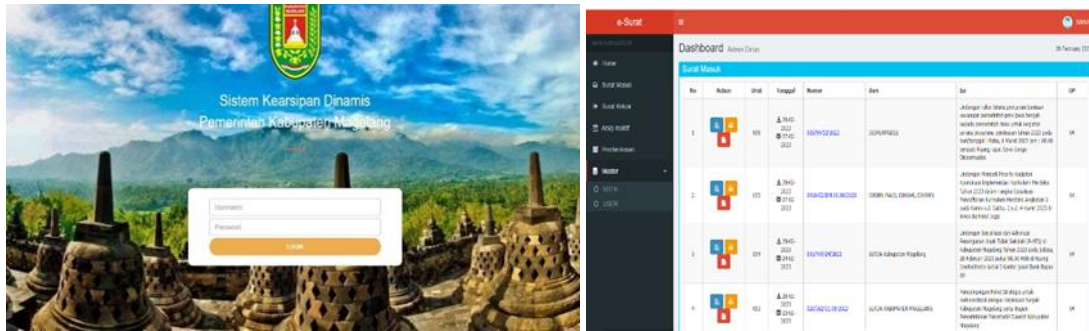
1. Kerja sama dengan BSRE terkait TTE, t
2. Komitmen pemimpin,
3. Alat komputer dan sambungan internet,
4. Struktur organisasi dan tata kerja lembaga, dan
5. Pilar kearsipan untuk Pedoman dalam mengelola Arsip Dinamis (yaitu Pedoman Tata Naskah Dinas, Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan SKKAAD).

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dikepalai oleh satu orang Kepala Dinas dan meliputi atas 1 Sekretariat dan 5 Bidang yaitu :

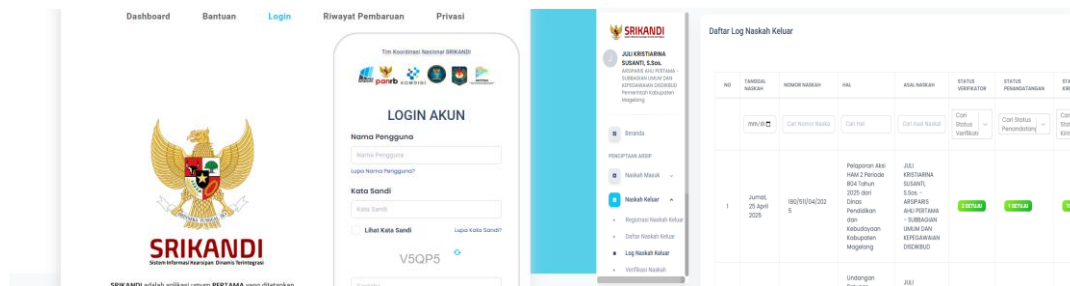
1. Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas,
2. Bidang Pembinaan SD,
3. Bidang Pembinaan SMP,
4. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan
5. Bidang Kebudayaan,

Tiap bidang dan sekretariat merupakan Unit Pengolah, sedangkan khusus Sekretariat adalah Unit Pengolah sekaligus Unit Kearsipan, Organisasi kearsipan di Disdikbud Kabupaten Magelang ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Kepala Disdikbud dengan SK Pengelola Arsip Disdikbud Kabupaten Magelang. Sehingga tiap bidang ada pengelola arsip bahkan arsiparis. Sejak Mei 2024 Disdikbud Kabupaten Magelang terdapat 5 (lima) orang arsiparis yaitu 2 (dua) orang PNS dan 3 (tiga) orang PPPK. Disdikbud Kabupaten Magelang memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis dibawah kewenangannya berupa satuan Pendidikan yang lebih dikenal sebagai sekolah mulai jenjang Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga Koordinator Wilayah Disdikbud di 21 kecamatan yang mengkoordinir 1 TK Negeri, 550 SD Negeri dan 59 SMP Negeri serta ratusan sekolah swasta.

Berdasarkan amanat yang tertuang dalam SE Setda Kabupaten Magelang terkait penerapan aplikasi SRIKANDI yang diterapkan mulai 2 Januari 2024, namun menjadi permasalahan bahwa dalam pelaksanaan belum mulai diterapkan secara optimal di Disdikbud Kabupaten Magelang karena masih familiar dengan Sistem Kearsipan Dinamis (SKD) yaitu sistem informasi tentang kearsipan yang telah dibuat oleh Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan arsip dinamis, yang sudah mulai digunakan mulai tahun 2017 untuk pencatatan dan penginputan surat masuk. Sehingga dengan adanya aplikasi yang baru berskala nasional yang diwajibkan untuk diterapkan oleh instansi di tingkat pusat dan daerah, tentu membutuhkan penyesuaian dan juga sosialisasi kepada seluruh pegawai Disdikbud Kabupaten Magelang.



Gambar 1. Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Kabupaten Magelang
(Sebelum Aplikasi Srikandi)



Gambar 2. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
(Sesudah Aplikasi Srikandi)

Sebagai aplikasi yang baru diterapkan tentunya masih terdapat kendala server ataupun sinyal saat penggunaan Aplikasi SRIKANDI ini, sehingga membawa kesan bahwa aplikasi yang harusnya mempermudah dan mempercepat pekerjaan menjadi dirasa kurang membantu atas kecepatan dan ketepatan pengerjaan tugas. Begitu juga dengan tampilan dan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi SRIKANDI yang perlu pengenalan lebih dalam setiap fitur dan kegunaannya. Apalagi dengan adanya penambahan fitur-fitur baru dalam aplikasi sehingga fitur yang sebelumnya masih dalam tahap dipelajari dan dikenal tapi kemudian muncul penambahan fitur sehingga membuat para sumber daya manusia (SDM) kearsipan yang ada menjadi kurang menguasai fitur dan kegunaannya.

Sekretariat sebagai Unit Kearsipan (UK) yang menjadi tempat berkonsultasi atas penerapan Aplikasi SRIKANDI, tentunya menjadi persoalan tersendiri karena personal di UK juga sama-sama baru mengenal Aplikasi SRIKANDI sehingga terkadang belum bisa memberikan jawaban dan solusi saat pengguna Aplikasi SRIKANDI dari bidang-bidang menemui kendala ketika menggunakan SRIKANDI.

Penerapan aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari transformasi digitalisasi dalam tata kelola kearsipan pemerintah menunjukkan suatu upaya konkret pemerintah dalam membentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui hasil studi literatur dan analisis data sekunder, ditemukan bahwa SRIKANDI memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan aspek-aspek good governance, meskipun masih terdapat tantangan yang harus diatasi.

Hal ini juga mendapatkan respon yang positif dari pengguna seperti yang disampaikan oleh (Aini, 2023) bahwa Tanggapan positif diterima dengan baik oleh unit kerja yang telah mengimplementasikan Srikandi, karena keberadaan aplikasi Srikandi mempermudah proses surat-menysurat dan penyelenggaraan kearsipan.

Menurut Mindarti (2016: 14), prinsip-prinsip dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Orientasi Konsensus, Keadilan, Efisiensi dan Efektivitas, Pertanggungjawaban, serta Visi Strategis. Dari sejumlah prinsip good governance yang ada, penelitian ini akan mengacu pada lima prinsip good governance menurut Sedarmayanti (2012: 7), yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, partisipasi, serta supremasi hukum. Sedarmayanti menyatakan bahwa lima prinsip utama itu dapat mencerminkan administrasi publik yang memenuhi ciri-ciri good governance. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance terkait pelaksanaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintergrasi) dapat dilihat pada prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi

Karena arsip digital lebih mudah ditelusuri dan tidak mudah diubah, SRIKANDI mendukung prinsip keterbukaan informasi dan transparansi melalui pengelolaan arsip yang terdokumentasi secara sistematis dan dapat diakses oleh pihak berwenang. Namun, karena beberapa organisasi belum memaksimalkan fitur publikasi arsip mereka, masih diperlukan kebijakan internal yang mengatur keterbukaan data..

2. Akuntabilitas

SRIKANDI melacak proses pengambilan keputusan, distribusi dokumen, dan penanganan arsip. Jejak digital yang tercatat secara otomatis memudahkan pemantauan yang lebih akurat atas kinerja pejabat atau pegawai yang menangani dokumen. Sistem ini menjadi lebih kuat jika didukung oleh pengawasan internal rutin.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Aplikasi SRIKANDI menghemat lebih banyak kertas dan mempersingkat waktu pencarian dan penciptaan arsip. Proses surat menyurat menjadi lebih mudah karena sistem mendukung pengiriman naskah dinas elektronik antarinstansi. Namun, organisasi yang menghadapi kendala seperti infrastruktur jaringan internet yang tidak memadai, perangkat keras yang terbatas, dan kurangnya keterampilan teknis karyawan masih dapat mencapai hasil yang lebih rendah.

4. Partisipasi

Selama proses penerapan SRIKANDI, pengguna masih terbatas. Dalam kebanyakan kasus, hanya sebagian kecil staf yang dapat mengakses pelatihan dan sosialisasi. Meskipun demikian, pelaksanaan bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh organisasi. Sangat diperlukan pendekatan partisipatif yang lebih intensif yang melibatkan pengguna dalam proses evaluasi dan pengembangan fitur aplikasi.

5. Aturan Hukum dan kepatuhan

Dengan menyediakan sistem pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar hukum, SRIKANDI mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun, banyak instansi masih belum menetapkan kebijakan internal yang mengatur penggunaan SRIKANDI. Karena aturan masih formal, kepatuhan harus diperkuat dengan insentif atau sanksi yang didasarkan pada kinerja.

Secara umum, pembahasan ini menunjukkan bahwa SRIKANDI adalah instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan organisasi, ketersediaan sumber daya, dan komitmen pimpinan. Implementasi yang tidak merata dapat menghambat pencapaian prinsip good governance secara utuh.

“Kemampuan analitis, komunikasi, penyelesaian serta pengambilan keputusan masalah, ketrampilan interpersonal dalam membangun usaha merupakan potensi sumber daya manusia dituntut untuk lebih peka terhadap perubahan lingkungan sekitar dan global sehingga sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan perusahaan harus mendapat perhatian yang progresif mengikuti tuntutan

potensial melalui pelatihan teknis dan manajemen produksi komersial, perluasan pasar, pengembangan network, serta memiliki jiwa inovatif, mandiri dan berdaya saing”(Karjono et al., 2023).

SHOLIKHAH, Fetrina Kamila (2024) Evaluasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Studi ini menyelidiki bagaimana aplikasi SRIKANDI diterapkan di Biro Hukum Kementerian Desa. Hasil menunjukkan bahwa, meskipun telah dilakukan upaya, masih ada masalah dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, yang mempengaruhi seberapa efektif aplikasi digunakan.

Alfenia Sinta Devina¹, Moh. Safi², Adi Prasetyawan³, Asmadi Mohammed Ghazali⁴ (2024) Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Batu, Hasil penelitian kuantitatif deskriptif menunjukkan bahwa aplikasi SRIKANDI di Kota Batu telah diterima dengan baik oleh penggunanya. Namun, ada masalah dengan adopsi teknologi dan perlunya pelatihan yang lebih baik bagi karyawan.

Riko Priyatmo Ramudin¹, Oci Hendra Satria² (2022) Analisis Aplikasi Srikandi Dengan Metode System Usability Scale (SUS) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI telah melaksanakan uji coba penggunaan aplikasi SRIKANDI sejak tahun 2020 dan setahun setelahnya, ANRI merilis Instruksi Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2021 Mengenai Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan ANRI yang berisi perintah untuk seluruh pegawai di lingkungan ANRI agar wajib menerapkan aplikasi SRIKANDI. Dengan ANRI sebagai pelaksana utama aplikasi SRIKANDI, keberhasilan implementasinya di ANRI menjadi tolok ukur untuk penerapan aplikasi SRIKANDI di lembaga lain. Diperlukan penilaian terkait pemanfaatan aplikasi SRIKANDI. Studi ini menggunakan metode System Usability Scale (SUS) untuk menilai tingkat kegunaan aplikasi SRIKANDI di ANRI. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun aplikasi ini mudah digunakan, tapi antarmuka pengguna dan fiturnya masih bisa diperbaiki.

Dwitya Nur Rahmawati, - (2024) Pengaruh Aplikasi Srikandi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Untuk mengevaluasi pengaruh aplikasi SRIKANDI dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan di ANRI, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa keduanya memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja karyawan, menunjukkan betapa pentingnya integrasi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia untuk menerapkan aplikasi.

Masrurotul Fadilah¹, Purwanto Putra² (2024) Transformasi Praktik Pengelolaan Arsip Dinamis melalui Aplikasi Srikandi Dinas Perpustakaan dan Arsip Purworejo: Studi Kualitatif Efek Implementasi pada Efisiensi dan Persepsi Pengguna. Penelitian ini melihat bagaimana aplikasi SRIKANDI meningkatkan efisiensi operasional, keamanan data, dan aksesibilitas arsip. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi ini meningkatkan keamanan data dengan fitur kontrol yang baik.

Catur Rahmawati Tejaningrum, (2023) Analisis efektivitas Layanan Arsip Dinamis Studi Kasus Pada Aplikasi SRIKANDI di Unit Pengelolaan Informasi dan Arsip Dinamis Biro Umum ANRI. Studi ini menganalisis efektivitas layanan arsip dinamis melalui aplikasi SRIKANDI dengan fokus pada sarana dan prasarana yang mendukung. Hasil menunjukkan bahwa untuk mendukung operasional yang lebih baik, pengembangan fitur aplikasi dan peningkatan kapasitas jaringan diperlukan meskipun ada peningkatan efisiensi.

Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menilai efektivitas aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip elektronik. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak digunakan dengan baik, dengan masalah seperti pemahaman pengguna yang buruk dan gangguan sistem yang sering. Temuan ini

menyoroti pentingnya pelatihan dan dukungan teknis untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi.

“Berdasarkan hal ini penting bagi instansi untuk memastikan bahwa alat kerja yang digunakan merupakan alat kerja yang efektif. Untuk mengetahui hal ini maka perlu dilakukan penilaian terhadap sistem. Penilaian terhadap suatu sistem dapat dilakukan dengan cara evaluasi untuk mengetahui kualitas atau nilai dari sesuatu” (Devina et al., 2024).

“Ada beberapa elemen kunci dari aplikasi Srikandi yang pertama adalah kemampuan untuk membuat arsip yang memungkinkan pembuatan, transmisi, dan penerimaan dokumen resmi secara elektronik di seluruh entitas pemerintah. Kedua untuk menjaga kehandalan, keaslian, dan integritas nya, terdapat fitur untuk pemeliharaan arsip” (Millenia & RFS, 2023).

“Sehingga governance dapat dikatakan merupakan suatu upaya dari pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Praktik governance dalam penyelenggaraan pemerintahan terbaiknya dapat disebut dengan good governance” (Mufti Rahajeng, 2021).

“Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat, kebutuhan akan pelayanan publik sangat besar. Pelayanan digital menjadi sebuah kebutuhan dalam pelayanan publik. Masyarakat saat ini semakin kritis dan mengharapkan pelayanan yang efisien, efektif dan transparan” (Noor et al., 2023).

“Aplikasi Srikandi telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi administrasi, terutama dalam hal pengesahan dokumen. Perubahan ini sejalan dengan tujuan awal aplikasi, yaitu mempercepat alur proses dan meningkatkan aksesibilitas dokumen secara real- time” (Rizal & Nurmantu, 2025).

“Pengguna merasa cukup mudah dalam menggunakan aplikasi, namun masih terdapat beberapa fitur yang masih harus ditingkatkan fungsinya”(Srikandi et al., 2025).

“Konsep E-Government sendiri membuat pergeseran dari berbagai aspek pemerintahan, termasuk kearsipan. Sebagai respons terhadap perubahan ini, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengembangkan sebuah aplikasi yang memiliki sistem terintegrasi secara menyeluruh, dimana aplikasi tersebut dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip”(Yogopriyatno & Roeliana, 2024).

“Transformasi inovasi dalam literasi digital memberikan landasan untuk perubahan positif dalam era teknologi modern. Inovasi akan membantu mempercepat proses pembelajaran dan akses pendidikan, serta mempermudah pencarian, analisis, dan berbagi informasi”(Erlinnawati & Purwanto, 2024).

“Program Srikandi dikonfigurasi untuk memungkinkan penggunaan dalam konteks kementerian atau lembaga apa pun, di lingkungan masing-masing instansi pengelola arsip dinamis. Sementara pengelolaan arsip yang efektif dapat menguntungkan sejumlah instansi pemerintah, terutama ketika menggunakan akuntabilitas kinerja di sektor publik”(Karjono et al., 2023).

“Pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel menjadi salah satu tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Seiring dengan berkembangnya era digital, pemerintah di Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk mengadopsi teknologi informasi guna mendukung efisiensi administrasi dan memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada Masyarakat”(Asa et al., 2024).

“Good governance merupakan suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, efisien dengan memegang teguh prinsip-prinsip tertentu. Indonesia mulai berusaha untuk mewujudkan good governance saat dimulainya era reformasi”(Arti & Rizky, 2023).

“Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dibuat untuk menghadirkan kelancaran dalam persuratan dan kearsipan secara elektronik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan”(Alhadi & Rahmawati, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan amanat keputusan MenPANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum untuk Kearsipan Dinamis yang mengatur Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum di bidang tersebut perlu diimplementasikan secara berkala karena pelaksanaan aplikasi SRIKANDI memberikan kontribusi positif terhadap penguatan prinsip-prinsip good governance di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi kearsipan. Aplikasi ini telah membantu menciptakan sistem pengelolaan arsip yang lebih tertata, terdokumentasi dengan baik, dan lebih mudah diakses secara digital.

Namun demikian, implementasi aplikasi SRIKANDI belum sepenuhnya optimal dalam penerapan guna mendukung tata Kelola pemerintahan di seluruh instansi pemerintah. Masih ditemukan berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, belum meratanya pelatihan bagi pegawai, serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja dari manual ke digital. Selain itu, partisipasi aktif pengguna dan penegakan kebijakan internal yang mendukung penggunaan SRIKANDI juga masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, agar aplikasi SRIKANDI dapat berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mendukung pemerintahan yang baik, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur digital yang lebih baik, dan penciptaan undang-undang yang mendukung yang tegas dan fleksibel. Evaluasi rutin pelaksanaan aplikasi SRIKANDI akan memungkinkan pencegahan dan perbaikan sejak dini. Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada evaluasi dampak jangka panjang dari intervensi tersebut terhadap perubahan perilaku pegawai dalam penyesuaian diri yang berkelanjutan terhadap transformasi digital dalam bidang kearsipan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Juli Kristiarina Susanti, S.Sos., dengan nama panggilan Santi, seorang lulusan Sarjana Administrasi Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta. Sejak usia remaja sudah ada ketertarikan terhadap menulis, diawali dengan menulis cerita fiksi untuk Majalah Dinding di sekolah dan ikut dalam Karya Tulis Ilmiah Remaja, meskipun belum mendapatkan kejuaraan di dalam menulis. Saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dalam jabatan Arsiparis Ahli Pertama. Pada tahun 2023, Santi meraih Penghargaan Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah kategori Keterampilan dan meraih Juara Harapan 1 dari Gubernur Jawa Tengah dimana dalam ajang lomba tersebut disyaratkan menulis karya tulis ilmiah dengan tema pengelolaan arsip di tempat kerja. Dan pada tahun 2025 ini, Santi kembali mengikuti ajang pemilihan Arsiparis Teladan Kategori Keahlian Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan berhasil meraih Juara 3 dengan mengambil judul makalah / karya tulis ilmiahnya yaitu Arsiparis Sang Garda Depan Transformasi Kearsipan Digital di Disdikbud Kabupaten Magelang. Di luar ketertarikan dalam menulis, Santi menikmati waktu membaca dan hobi menyanyi.

REFERENSI

- [1] Aini, Y. N. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 7(1), 84–88. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/900>
- [2] Alhadi, M., & Rahmawati, R. (2024). Indrajit (2016:2). ANTASENA: Governance and Innovation Journal, 2(2), 167–185. <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/antasena/article/view/243>

- [3] Aristriya, D. (2024). Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (Srikandi) Sebagai Upaya Mitigasi Arsip Kebencanaan. 11(2), 141–147.
- [4] Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135–149. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798>
- [5] Asa, E. S., Rembu, Y., & Timor, U. (2024). Manajemen Informasi Administrasi dan Kearsipan Menggunakan Aplikasi SRIKANDI dalam Pelayanan Publik di Setjen DPR RI.
- [6] Azzahra, A. F., Deliarnoor, N. A., & Kasman, A. (2025). Evaluasi Efisiensi Sistem Kearsipan Elektronik dalam Pengelolaan Arsip Dinamis: Studi Kasus Pada Aplikasi SRIKANDI di Institusi Pemerintah. 7(2), 1303–1317. Aini, Y. N. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 84–88. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/900>
- [7] Devina, A. S., Safii, M., Prasetyawan, A., & Ghazali, A. M. (2024). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Batu. *BIBLIOTIKA : Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 8(1), 220. <https://doi.org/10.17977/um008v8i12024p220-237>
- [8] Erlinnawati, A., & Purwanto, E. (2024). Peran Teknologi dan Komunikasi dalam Manajemen Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 1(4), 11. <https://doi.org/10.47134/jbk.d.v1i4.3034>
- [9] Fadilah, M., Putra, P., D-iv, M. P. S., Terbuka, U., Pembimbing, D., & Terbuka, U. (2024). Transformasi Praktik Pengelolaan Arsip Dinamis melalui Aplikasi Srikandi Dinas Perpustakaan dan Arsip Purworejo : Studi Kualitatif Efek Impelentasi pada Efesiensi dan Persepsi Pengguna . 282–295.
- [10] Karjono, K., Kusumawati, E. D., & Karmanis, K. (2023). Implementasi Kebijakan Publik Dengan Konsep Good Governance Dalam Meningkatkan Pemasaran Potensi Produk Domestik Program Gerai Maritim Dan Umkm. *Zona Laut Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi Kelautan*, 4(2), 77–84. <https://doi.org/10.62012/zl.v4i2.26515>
- [11] Kartiana, R. F., Indrahti, S., Studi, P., Fakultas, K., Sosial, I., Dinamis, P. A., & Srikandi, A. (2024). Pemanfaatan Aplikasi Srikandi terhadap Pengelolaan Arsip Dinamis dalam rangka Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 5(2), 436–447.
- [12] Millenia, & RFS, H. T. (2023). Efektivitas Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru Millenia 1 , Harapan Tua RFS 2. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023(15), 403–408.
- [13] Mufti Rahajeng, M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 163. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3912>

- [14] Noor, A. S. S. P., Damayanti, F., & Garnida, A. (2023). Aplikasi Srikandi dalam Meningkatkan Komunikasi Tertulis di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat. *Manajemen Dan Sistem Informasi*, 22(2), 216–226.
- [15] Priyatmo, R., & Hendra Satria, O. (2022). Electronic Records, Record Management System, System Usability Scale, SRIKANDI. *Jurnal Kearsipan*, 17(1), 21–42. <https://doi.org/10.46836/jk.v17i1.192>
- [16] Rahmasari, E. (2024). Efektivitas penggunaan aplikasi srikandi (sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi) pada dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten aceh barat.
- [17] Rizal, R., & Nurmantu, S. (2025). Evaluasi Kebijakan Penerapan Aplikasi Srikandi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2023 -. 12(1), 126–133.
- [18] Sedarmayanti. 2012. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Bagian Kedua Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- [19] Srikandi, T., Kasus, V., & Politeknik, D. I. (2025). Evaluasi Usability Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. 9(5), 1–14.
- [20] Yogopriyatno, J., & Roeliana, L. (2024). Kesiapan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Kota Bengkulu. *Jurnal Administrasi Dan Kesekretarisan*, 9(1), 31–44. <http://www.journal.starki.id/index.php/JAK/article/view/1125>
- [21] Undang- undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (dan Peraturan Pelaksanannya)
- [22] Undang-undang Nmor. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik
- [23] Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- [24] Keputusan Menteri PAN dan RB nomor 679 tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
- [25] Peraturan Arsip Nasional Rebuplik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Indomasi Kearsiapan Dinamis Terintegrasi